

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No. 20 tahun 2003, adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sedemikian rupa supaya peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif serta memiliki pengendalian diri, kecerdasan, keterampilan dalam bermasyarakat, kekuatan spiritual keagamaan, keperibadian serta akhlak mulia. Menurut Ki Hadjar Dewantara Pendidikan yaitu tuntutan dalam hidup tumbuhnya anak-anak yang bermaksud menuntun segala kekuatan kodrati pada anak-anak itu supaya mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat mampu menggapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan diuraikan dengan jelas bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, sedangkan pada ayat (2) dijelaskan bahwa masyarakat yang dimaksud adalah meliputi (a) penyelenggara ataupun satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, (b) peserta didik, orangtua atau wali peserta didik dan (c) pihak-pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan, pengertian pada pasal 2 ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari pada Bab XIII pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, yang intinya adalah bahwa pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Selanjutnya dijelaskan mengenai komponen biaya pendidikan dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 secara terperinci mengenai definisi dan komponen biaya pendidikan yang merupakan tanggung jawab pemerintah dialokasikan dalam APBN, yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dialokasikan dalam APBD, sesuai dengan sistem penganggaran dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa

memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun dapat diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP. Pada tahun 2005 APK SD telah mencapai 115%, sedangkan SMP pada tahun 2009 telah mencapai 98,11%, sehingga program wajar 9 tahun telah tuntas 7 tahun lebih awal dari target deklarasi Education For All (EFA) di Dakar.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menurut petunjuk teknis BOS SD dan SMP yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas.

Setelah program wajib belajar 9 tahun tuntas pemerintah mengalami masalah kembali untuk penuntasan wajib sekolah 12 tahun oleh karena itu program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai salah satu bentuk pendanaan pendidikan yang signifikan dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam rangka pelaksanaan Program Pendidikan Menengah Universal (PMU), pada tahun 2015, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMA/SMK di seluruh Indonesia. Program BOS SMA/SMK yang merupakan program utama ini diharapkan mampu membantu memenuhi biaya operasional sekolah dan memberikan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu terutama bagi siswa miskin.

BOS SMA/SMK merupakan program Pemerintah berupa pemberian dana langsung ke sekolah dimana besaran dana bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah dan satuan biaya (unit cost) bantuan. BOS SMA/SMK digunakan untuk membantu sekolah memenuhi biaya operasional sekolah non personalia. Sebagai wujud keberpihakan terhadap siswa miskin atas pengalokasian dana BOS SMA/SMK tersebut, sekolah diwajibkan untuk membebaskan dan/atau membantu siswa miskin. Jumlah siswa yang dibebaskan atau mendapat keringanan biaya pendidikan menjadi

kebijakan sekolah dengan mempertimbangkan faktor jumlah siswa miskin yang ada, dana yang diterima dan besarnya biaya sekolah.

BOS SMA/SMK mengikuti pedoman yang disusun oleh pemerintah, dengan mengutamakan konsep manajemen berbasis sekolah (MBS) yaitu dilaksanakan secara swakelola dan partisipatif, transparan, akuntabel, demokratis, efektif efisien, tertib administrasi dan pelaporan, serta saling percaya. Menurut undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu serta relevansi pendidikan untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Di Indonesia banyak anak-anak yang justru harus putus sekolah dan tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Jumlah anak putus sekolah dan berpendidikan rendah di Indonesia terbilang relatif tinggi. Berdasarkan laporan dari departemen Pendidikan dan Kebudayaan, setiap menit ada empat anak yang harus putus sekolah. Sementara itu, menurut pengamat pendidikan, Muhammad Zuhdan, sebagaimana dilansir suaramerdeka.com, 09/03/2015, mengatakan bahwa tahun 2014 tercatat terdapat 1,3 juta anak usia 7-15 tahun di Indonesia terancam putus sekolah. Tingginya angka putus sekolah ini, salah satunya akibat mahal biaya pendidikan. Tentu saja kondisi ini sangat memprihatinkan, mengingat bahwa seluruh anak di Indonesia harus memperoleh pendidikan dasar minimal 12 tahun (jenjang SD-SMA/SMK).

Data dari Kemendikbud menyebutkan bahwa pada tahun 2015, dari 100% anak-anak yang masuk SD, yang melanjutkan sekolah hingga lulus hanya 80%, sedangkan 20% lainnya harus putus sekolah. Dari 80% siswa SD yang lulus sekolah, hanya 61% yang melanjutkan sekolah ke jenjang SMP atau yang setingkat lainnya. Kemudian setelah itu hanya 48% yang akhirnya lulus sekolah. Sementara itu, 48% yang lulus dari SMP hanya 21% yang bisa melanjutkan ke jenjang SMA/SMK. Sedangkan yang bisa lulus jenjang SMA/SMK hanya sekitar 10%.

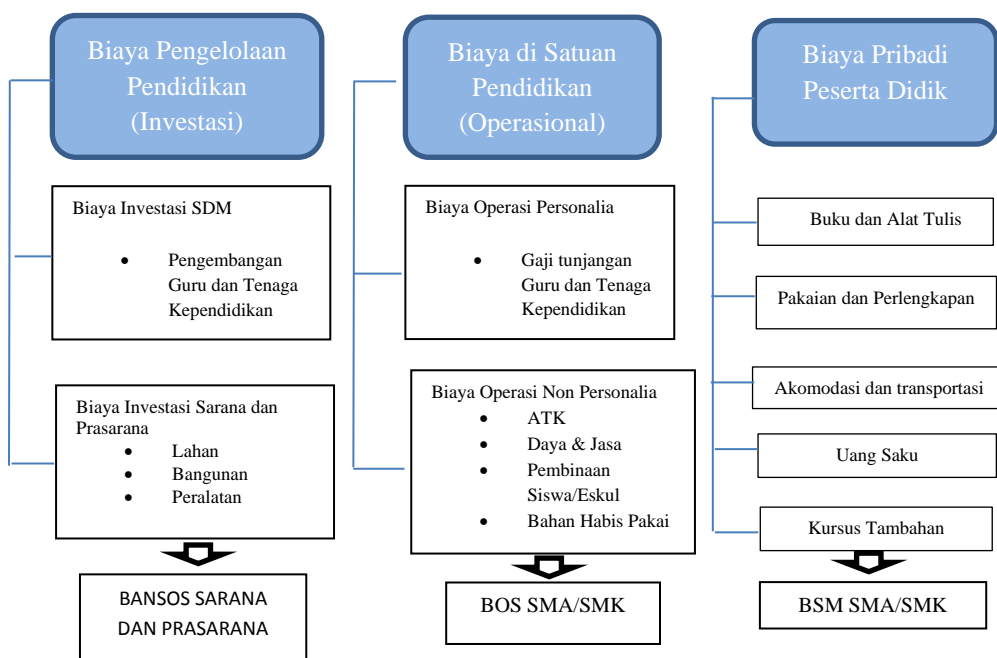
Berdasarkan permasalahan tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan rintisan program Wajib Belajar 12 Tahun, Pemerintah telah menyiapkan program BOS SMA/SMK pada Tahun 2015, telah disiapkan anggaran sebesar RP. 5,347 triliun rupiah yang akan disalurkan kepada SMA/SMK Negeri dan Swasta di seluruh

Indonesia. Salah satu tujuan program BOS SMA ini adalah membantu sekolah untuk memenuhi biaya operasional non-personalia.

Sasaran Program menurut Petunjuk Teknis BOS Sekolah Menengah Atas Tahun 2015 adalah untuk SMA/SMK Negeri dan Swasta di seluruh Indonesia. Besar bantuan per sekolah diperhitungkan dari jumlah siswa, dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa per sekolah dan satuan biaya BOS SMA. Satuan biaya nasional (unit cost) program BOS SMA sebesar Rp. 1.200.000/siswa/tahun. Sehingga total anggaran program BOS SMA tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 5.347.291.800.000
2. Untuk penyaluran periode januari-juni sebesar Rp 600.000/siswa dan periode Juli-Desember sebesar Rp. 600.000/siswa.

Untuk Skenario pendanaan pendidikan menengah merupakan upaya untuk menyediakan sejumlah dana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan proses pendidikan di sekolah menengah. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan menyebutkan bahwa biaya pendidikan meliputi : (a) Biaya Investasi Sekolah (Pengelolaan Pendidikan), (b) Biaya Operasional Sekolah (Biaya di Satuan Pendidikan), dan (c) Biaya Pribadi Peserta Didik. Berikut ini Skenario pendanaan pendidikan menurut Juknis BOS Tahun 2015:



Fahmi Mohamad Rizki, 2017

PENGARUH KETEPATAN ANGGARAN, KECUKUPAN ANGGARAN DAN SASARAN ANGGARAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TERHADAP KINERJA PEMBIAYAAN SEKOLAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Sumber: Juknis BOS SMA/SMK tahun 2015

Gambar 1 1 Szenario Pendanaan Pendidikan

Tabel 1. 1
Rekapitulasi SMA dan SMK Negeri/Swasta realisasi per komponen Provinsi Jawa Barat 2015

No	Komponen	Realisasi anggaran tahun 2015		Prosentase	
		SMA	SMK	SMA	SMK
1	Pengadaan Buku Teks Pelajaran dan Buku Bacaan	281,081,500.00	332,216,038	6.31%	2.92%
2	Pembiayaan Pengelolaan Sekolah	778,975,150	1,189,104,399	17.48%	10.45%
3	Pengadaan Alat Habis Pakai Praktikum Pembelajaran	410,388,100	1,199,345,500	9.21%	10.54%
4	Pengadaan Bahan Habis Pakai Praktikum Pembelajaran	458,189,900	1,713,653,000	10.28%	15.06%
5	Langganan Daya dan Jasa	284,778,248	631,498,447	6.39%	5.55%
6	Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran	535,897,150	648,894,350	12.03%	5.70%
7	Kegiatan Pembelajaran/Intra Kurikuler dan Ekstra Kurikuler	528,921,340	655,203,950	11.87%	5.76%
8	Pemeliharaan dan Perawatan Sarana/prasarana Sekolah	955,705,517	2,449,033,875	21.45%	21.52%
9	Kegiatan Penerimaan Siswa Baru	127,879,300	274,563,250	2.87%	2.41%
10	Pembiayaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Manajemen Sekolah	47,677,500	507,237,110	1.07%	4.46%
11	Pengelolaan Data Individual SMA melalui Dapodikdasmen	24,720,700	491,640,050	0.55%	4.32%
12	Pengembangan Website Sekolah	2,000,000	29,164,500	10.22%	0.26%
13	Biaya Asuransi Keamanan dan Keselamatan Sekolah Serta Penanggulangan Bencana	0	778,705,450	0.00%	6.84%
14	Pembelian Peralatan Komputer Pembelajaran	0	135,255,200	0.00%	1.19%
15	Penyelenggaraan praktek kerja industri (prakerin) praktek kerja lapangan (PKL)	0	7,500,000	0.00%	0.07%
16	Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Kejuruan	0	286,653,750	0.00%	2.52%
17	Pelaporan BOS SMA/SMK	42,871,644	50,727,781	0.44%	0.45%
	Total Penggunaan	4,455,776,134.00	11,380,396,650	100.00%	100.00%

Sumber: Kemendikbud.go.id

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa sasaran per komponen penggunaan BOS dari SMA dan SMK baik swasta maupun negeri menunjukkan dana yang masuk sudah besar dan

Fahmi Mohamad Rizki, 2017

PENGARUH KETEPATAN ANGGARAN, KECUKUPAN ANGGARAN DAN SASARAN ANGGARAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TERHADAP KINERJA PEMBIAYAAN SEKOLAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

mengeluarkan uang Negara yang tidak sedikit. Serta prosentase yang paling tinggi ditunjukkan urutan no delapan untuk pengelolaan sarana dan prasarana, Namun apakah angka-angka yang tertera di atas sudah menghasilkan kinerja yang bagus untuk setiap sekolah yang menerima dana BOS tersebut, mulai dari pengelolaan, sarana dan prasarana serta yang paling utama dari pengajarnya tersebut, bisa memberikan tunjangan profesi Guru yang baik dan benar. Dari semua data-data di atas apakah Ketepatan anggaran tiap post nya sudah benar di laksanakan dengan baik sesuai Juknis BOS Tahun 2015 serta cukupkah anggaran yang diperuntukan untuk membeli tiap post kebutuhan mulai dari pengadaan alat tulis sekolah, pengadaan alat habis pakai, pengadaan buku pelajaran sampai dengan biaya asuransi keamanan dan keselamatan sekolah dan penyusunan dan pelaporan dana BOS.

Kecukupan anggaran menurut Naouri dan Parker (1998) dalam Yunita (2009:7) adalah tingkatan dimana seseorang merasa bahwa sumber-sumber anggarannya cukup atau memadai untuk memenuhi syarat-syarat dalam bidang pekerjaannya, dimana para bawahan memiliki informasi yang berpengaruh tentang tingkatan dukungan anggaran yang dikehendaki untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan mereka. Keberhasilan individu maupun organisasi tergantung pada keadaan dimana bawahan dapat menerima dukungan anggaran yang memadai. Jadi untuk terselenggaranya suatu kegiatan atau pekerjaan harus mempunyai kecukupan anggaran yang baik, karena jika tidak kegiatan tersebut tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana yang telah disusun sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu kepala Sekolah SMA di Kota Tasikmalaya, menjelaskan tentang sasaran penggunaan bos serta alokasi anggaran BOS, dilihat dari segi nominal uangnya, anggaran BOS untuk SMA/SMK itu cukup besar bahkan jika tidak bisa mengontrol dengan baik Anggaran BOS yang dikucurkan dari Anggaran Negara bisa menjadi bahan kecurangan atau korupsi, baik di tingkat Nasional, Provinsi, bahkan sampai kepada pemerintah daerah. Dengan diberlakukannya BOS di tingkat SMA khusus nya di Kota Tasikmalaya, terjadi penurunan mulai dari Tingkat Kesejahteraan Guru, Sarana dan Prasarana, Alokasi perawatan sekolah serta yang paling berdampak kepada murid yaitu menurunnya anggaran untuk kegiatan di luar sekolah, contohnya saja kegiatan ekstrakurikuler, Didalam anggaran BOS sebenarnya yang terjadi penurunan di beberapa sektor yang dirasakan anggarannya memang ada namun dilihat lagi dilapangan anggaran

BOS itu bisa dibbilang tidak cukup, karena pihak sekolah tidak boleh memungut lagi uang meskipun hanya diperuntukan untuk Kegiatan Operasional Sekolah.

Didalam segi sarana dan Prasarana sejak diberlakukannya BOS di tingkat SMA/SMK baik Negeri dan Swasta sangat terlihat penurunannya, contohnya saja Sekolah yang sejak awalnya memiliki fasilitas AC di setiap ruangan kelas untuk proses pembelajaran mendadak di ganti oleh kipas angin, mengapa demikian, beliau menjelaskan uang untuk pemeliharaan sekolah tanpa adanya AC juga sekolah masih banyak yang kebingungan untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya. Dari segi pengajar atau Guru kinerja mereka masih tetap bagus tetapi Guru yang biasanya mendapatkan tunjangan tambahan sekarang mereka tidak mendapatkannya sejak diberlakukannya BOS, untuk membayar Guru Honorer pun masih banyak pihak sekolah yang kesulitan untuk membayarnya padahal tenaga pendidik itu hal yang utama apalagi kinerja guru tersebut bagus. Sasaran Anggaran Menurut Juknis BOS Tahun 2015 sasaran yang dimaksud merupakan untuk siapa dana BOS diberikan, agar tujuan dari program BOS tersebut. Dengan demikian sasaran anggaran pada kinerja pembiayaan sekolah untuk pencapaian hasil yang sesuai diharapkan harus tepat sasaran yang sudah dijelaskan peruntukannya. Hal ini didukung dengan pendapat Mulyadi (2001:489) yang menyatakan salah satu karakteristik anggaran, menganalisis dan menjelaskan kinerja keuangan anggaran serta selisihnya.

Uraian di atas menunjukkan begitu banyak dimensi yang dapat dijadikan rujukan untuk mengukur kinerja sekolah. Keragaman tersebut menurut Bryson (dalam Haryoto, 2008) sebagai akibat adanya alternatif alokasi sumber daya yang berbeda, alternatif desain-desain organisasi yang berbeda, dan pilihan-pilihan pendistribusian tugas dan wewenang yang berbeda dari setiap organisasi. Oleh karena itu menurut Haryoto (2008) dalam menilai kinerja organisasi harus dikembalikan pada tujuan atau alasan dibentuknya suatu organisasi.

Berdasarkan tujuan penyelenggaraan sekolah (SMA/SMK) dan standar kompetensi siswa yang diharapkan setelah mengikuti pendidikan maka penyusunan indikator kinerja sekolah dapat dilihat dari komponen-komponen sebagai berikut: a. Kurikulum, b.peserta didik, c.ketenagaan/guru, d. sarana dan prasarana, e.organisasi dan manajemen sekolah, f. pembiayaan, g. peran serta masyarakat.

Kinerja sekolah di dalam Jurnal (Muhroji: 2012) standar nasional pendidikan diukur dengan 7 (tujuh) komponen, dari ke 7 (tujuh) komponen kinerja sekolah, penelitian ini akan menggunakan komponen Pembiayaan sebagai indikator kinerja sekolah. Serta didalam komponen pembiayaan pendidikan, indikator-indikator kinerja yang berhubungan dengan pembiayaan pendidikan : 1). Sumber dana dari pemerintah, 2). Sumber dana dari orang tua murid, 3). Sumber dana dari masyarakat, 4). Ketersediaan dana, 5). Komponen-komponen yang dibiayai, 6). Anggaran sekolah, 7). Laporan realisasi anggaran, 8). Pemeriksaan laporan keuangan sekolah.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH KETEPATAN ANGGARAN, KECUKUPAN ANGGARAN DAN SASARAN ANGGARAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TERHADAP KINERJA PEMBIAYAAN SEKOLAH (Studi Kasus Pada Sekolah SMA/SMK Negeri dan Swasta di Kota Tasikmalaya).”**

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah berdasarkan fenomena yang ada, maka pada penelitian penulis ini dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Ketepatan Anggaran BOS terhadap Kinerja Pembiayaan Sekolah
2. Bagaimana pengaruh Kecukupan Anggaran BOS terhadap Kinerja Pembiayaan Sekolah
3. Bagaimana pengaruh Sasaran Anggaran BOS terhadap Kinerja Pembiayaan Sekolah
4. Bagaimana pengaruh Ketepatan Anggaran, Kecukupan Anggaran dan Sasaran Anggaran BOS terhadap Kinerja Pembiayaan Sekolah.

1.2 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.2.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk kegiatan menganalisa mengenai ketetapan Anggaran, kecukupan Anggaran serta sasara Anggaran Bantuan Operasional Sekolah terhadap Kinerja Pembiayaan Sekolah.

1.2.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mengetahui Pengaruh Ketetapan Anggaran BOS terhadap Kinerja Pembiayaan Sekolah Negeri dan Swasta

Fahmi Mohamad Rizki, 2017

PENGARUH KETEPATAN ANGGARAN, KECUKUPAN ANGGARAN DAN SASARAN ANGGARAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TERHADAP KINERJA PEMBIAYAAN SEKOLAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2. Mengetahui Pengaruh Kecukupan Anggaran BOS terhadap Kinerja Pembiayaan Sekolah Negeri dan Swasta
3. Mengetahui Pengaruh sasaran Anggaran BOS terhadap Kinerja Pembiayaan Sekolah Negeri dan Swasta
4. Gambaran Ketepatan Anggaran, Kecukupan Anggaran serta Sasaran Anggaran Bantuan Operasional Sekolah terhadap Kinerja Pembiayaan Sekolah.

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari berbagai aspek sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis
 - a. Memberikan kontribusi pada sekolah untuk bisa memicu persaingan antara sekolah Negeri dan Swasta serta untuk memberikan pentingnya pengelolaan Anggaran BOS oleh pihak sekolah
 - b. Dapat memberikan wawasan pentingnya sasaran serta pengelolaan Anggaran BOS yang baik dan benar sesuai dengan prosedur.

2. Manfaat Praktis

Terutama untuk Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia bisa memberikan gambaran sampai dimana Anggaran BOS itu bergulir sehingga anak-anak Indonesia bisa mempunyai sumber daya manusia yang baik